

## DAFTAR ISI

### Mengelola Perbatasan Negara

1. Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia  
*Iva Rachmawati dan Fauzan* 95-109
2. Rezim Persahabatan ASEAN dalam Tata Kelola Lintas Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Berbasis *Connectivity*  
*Saptopo B Ilkodar* 110-124
3. Penguatan *Human Security* sebagai Strategi Pengelolaan Perbatasan Indonesia-Malaysia  
*Yohanes Sanak* 125-135
4. Keamanan Energi dan Hubungan Kerja Sama Cina-Jepang  
*Uni Wahyuni Sagena, Ravichandran Moorthy* 136-152
5. Signifikansi Desentralisasi Kehutanan Bagi Implementasi REDD+ di Kabupaten Maluku Tengah  
*Emilianus Yakob Sese Tolo* 153-168
6. Menuju Demokrasi Rasional:  
Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik  
*Antonius Galih Prasetyo* 169-185

## Rezim Persahabatan ASEAN dalam Tata Kelola Lintas Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Berbasis *Connectivity*

**Saptopo B Ilkodar**  
UPN "Veteran" Yogyakarta  
Email: saptopo@yahoo.com

### Abstract

This article elaborates compatibility of ASEAN's value with that of the idea of Indonesia-Malaysia borderland governance based on connectivity and common prosperity. It compares the basic value of ASEAN's regime on amity on the one hand, with that of the borderland governance on the other. The result shows that the two concept are compatible on the surface but contradict to each other in the deeper layer. The idea of Indonesia-Malaysia borderland governance together with ASEAN Connectivity could potentially replace the nature of intra ASEAN relationship of solidarity to business partner.

### Key Words:

ASEAN amity regime, border governance, connectivity

### Abstraksi

Tulisan ini memaparkan kajian tentang kecocokan (*compatibility*) rezim persahabatan ASEAN dengan gagasan tentang tata kelola lintas perbatasan darat Indonesia-Malaysia berbasis *connectivity and common prosperity*. Kajian dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai yang melandasi rezim persahabatan ASEAN pada satu sisi, dengan nilai-nilai yang melandasi gagasan tata kelola perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* dan program *ASEAN Connectivity* pada sisi lain. Hasilnya, konsep-konsep tersebut saling memiliki kecocokan pada level empiris-praktis, tetapi berbenturan pada level yang lebih mendasar. Penerapan gagasan tata kelola lintas perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* bersama-sama dengan ASEAN Connectivity pada akhirnya dapat menggeser corak hubungan intra ASEAN dari corak kesetiakawanan menjadi corak "mitra bisnis".

### Kata Kunci:

rezim persahabatan ASEAN, tata kelola lintas perbatasan, *connectivity*

### Pendahuluan

Perbincangan tentang tata kelola lintas perbatasan darat Indonesia-Malaysia berbasis *connectivity and common prosperity* tidak bisa dilepaskan dari konsep ASEAN *Connectivity*. Tata kelola lintas perbatasan berbasis konektivitas dan kemakmuran bersama bukan hanya sejalan dengan

gagasan konektivitas ASEAN, melainkan secara normatif memang seharusnya begitu oleh karena program konektivitas ASEAN dengan sendirinya mengikat seluruh negara anggota, termasuk Indonesia dan Malaysia yang merupakan dua dari lima negara pendiri ASEAN.

Konektifitas ASEAN merupakan upaya menghubungkan sarana-prasarana fisik, kelembagaan, dan antarpenduduk negara-negara anggota ASEAN yang dimaksudkan untuk mendukung pembentukan komunitas ASEAN. Semakin eratnya keterhubungan ASEAN itu dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mempersempit kesenjangan pembangunan antarnegara anggota ASEAN. Selain itu, keterhubungan ASEAN juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam kompetisi ekonomi global, serta mempererat hubungan negara-negara intra kawasan Asia Tenggara maupun antara ASEAN dengan negara-negara di kawasan lain (ASEAN Secretariat, 2011).

Kedua gagasan tentang konektifitas itu pada akhirnya akan dan harus menggeser cara pandang terhadap perbatasan. Pergeseran cara pandang itu mengandung konsekuensi berupa keharusan melakukan adaptasi cara kerja dari berbagai lembaga terkait di dalam negeri Indonesia yang sampai belakangan ini cenderung memiliki ego sektoral yang kuat.

Selama ini, dalam pemberitaan di media massa, masalah perbatasan lebih sering digambarkan sebagai garis pemisah antarnegara serta penanda awal atau akhir wilayah kedaulatan. Gambaran mengenai hal itu dapat dilihat dalam pemberitaan media massa berikut reaksi publik atas isu perbatasan Indonesia-Malaysia yang dalam rentang tiga tahun telah meledak sebanyak tiga kali. Dengan penggambaran seperti itu maka tata kelola yang ditawarkan lebih banyak berupa usaha menjaga “tembok” pemisah itu dengan maksud agar penduduk kedua negara, khususnya yang tinggal di kawasan perbatasan, tidak melompatinya.

Tahun 2009 muncul pemberitaan tentang manuver kapal Angkatan Laut Malaysia di Blok Ambalat (*Kompas.com*, 6 Juni 2009a). Publik merespon pemberitaan

tersebut dengan berbagai aksi. Salah satu bentuk aksinya berupa demonstrasi yang dilakukan di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta (*Tempo Interaktif*, 11 Juni 2009). Respon lainnya berupa kesiapan untuk membuka pendaftaran relawan Barisan Muda Nahdatul Ulama (BMNU) dalam rangka menghadapi konfrontasi dengan Malaysi (*Kompas.com*, 6 Juni 2009b). Respon lainnya bersifat lebih tegas, yaitu tentara memberi pelatihan menembak kepada penduduk di kawasan perbatasan, yaitu di wilayah Sebatik, Kalimantan Timur (*Tempo Interaktif*, 1 Juni 2009).

Tahun 2010 muncul pemberitaan tentang penangkapan tiga orang petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau oleh *Marine Police Malaysia* (MPM) saat para petugas DKP tersebut melakukan penangkapan terhadap nelayan Malaysia yang menangkap ikan di perairan Indonesia (*Kompas.com*, 15 Agustus 2010). Publik di Indonesia merespon pemberitaan itu antara lain dengan melakukan aksi demonstrasi yang diwarnai pembakaran bendera Malaysia (*antarasumut.com*, 17 Agustus 2010). Respon lainnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan melakukan langkah-langkah diplomasi tingkat tinggi, ditandai dengan pelaporan kasus tersebut oleh menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan kepada presiden (*Kompas.com*, 15 Agustus 2010).

Tahun 2011 muncul pemberitaan tentang terjadinya pergeseran patok batas wilayah negara yang berlokasi di Desa Camar Bulan, Kecamatan Palok, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Diberitakan bahwa pergeseran patok batas itu membuat wilayah Indonesia berkurang hingga 1.499 hektar (*suarapembaruan.com*, 13 Oktober 2011). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah segera meninjau lokasi dan melakukan persiapan untuk pembahasan mengenai hal tersebut

dengan Malaysia yang saat itu akan berlangsung di Jakarta (suarapemburuan.com, 13 Oktober 2011; *Republika.co.id*, 13 Oktober 2011).

Dengan digunakannya dua konsep *connectivity* itu, yaitu konsep tata kelola perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* dan program *ASEAN Connectivity*, maka masalah perbatasan harus dilihat sebagai garis penghubung antarnegara. Konsekuensinya, tata kelola yang ditawarkan akan lebih banyak berupa upaya membangun pintu masuk atau bahkan “arena bermain bersama”.

Perubahan cara pandang tersebut akan membawa implikasi pada banyak hal. Dalam bidang keamanan, misalnya, akan terjadi pergeseran dari konsep keamanan negara menjadi konsep keamanan manusia. Dalam pembangunan wilayah, bergeser dari membangun benteng pertahanan ke membangun sarana-prasarana untuk kepentingan sosial-ekonomi bersama. Demikian pula dalam bidang-bidang yang lain, seperti sarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan lainnya.

Pergeseran cara pandang terhadap perbatasan beserta implikasi yang ditimbulkannya itu menarik untuk dilihat dalam bingkai spirit ASEAN, yaitu: bagaimana keselarasan kedua konsep itu dengan rezim persahabatan ASEAN? Hal itu penting karena spirit ASEAN telah disepakati menjadi landasan dalam semua interaksi ASEAN, yang karena itu perlu terus diuji dalam berbagai kasus. Dengan kata lain, apakah gagasan tentang tata kelola lintas perbatasan darat Indonesia-Malaysia sejalan dengan spirit ASEAN?

Kajian mengenai hal tersebut dilakukan dengan teori internasionalisme liberal, sebuah teori hubungan internasional yang meyakini bahwa hubungan internasional dapat dikelola untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia dengan mendasarkan pada tiga

pilar, yaitu demokrasi liberal, perdagangan bebas, dan keamanan bersama (Burchill, 1996).

Tulisan ini diawali dengan paparan tentang rezim persahabatan ASEAN yang merupakan landasan dalam semua interaksi negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya diuraikan *ASEAN Connectivity* untuk menunjukkan telah adanya landasan operasional untuk gagasan tentang tata kelola lintas perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity*, yang merupakan bahasan pada bagian berikutnya. Selanjutnya, dalam pembahasan, dipaparkan perbandingan alur logika antara rezim persahabatan ASEAN pada satu sisi, dengan *ASEAN Connectivity* dan gagasan tata kelola lintas perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* pada sisi lain. Di dalamnya diulas pula implikasi yang muncul dari perbedaan alur logika itu.

### Rezim Persahabatan ASEAN

Dalam studi hubungan internasional, rezim dipahami sebagai sekumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan yang (semuanya itu) dinyatakan secara implisit maupun eksplisit, dimana harapan-harapan para pelaku bisa mencapai titik temu dalam bidang tertentu pada hubungan internasional. Rezim mengandung pengertian lebih dari sekedar perjanjian dan persetujuan internasional. Perjanjian, persetujuan, konvensi, dan hukum internasional memang merupakan tulang punggung rezim internasional. Akan tetapi rezim tidak sama dengan perjanjian, persetujuan, atau konvensi itu sendiri. Dengan kata lain, rezim mengandung pengertian keseluruhan fungsi dari suatu rangkaian yang bersifat heterogen yang terdiri atas persetujuan-persetujuan, praktek-praktek, dan lembaga-lembaga internasional baik formal maupun non formal (Hasenclever, 1997).

Rezim persahabatan ASEAN yang dimaksud dalam tulisan sini adalah sekumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan dalam interaksi ASEAN sebagaimana dimaksud dalam *Treaty of Amity and cooperation* (TAC) yang disepakati pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Traktat yang terdiri dari 20 pasal dan dikelompokkan dalam empat bab itu bertujuan membangun perdamaian abadi dan persahabatan serta kerjasama yang kekal antarpenduduk untuk mendukung terciptanya kekuatan, solidaritas, serta hubungan yang lebih erat (ASEAN Sekretariat, 1976).

Traktat tersebut mengandung 6 (enam) prinsip yang dijadikan landasan interaksi ASEAN baik ke dalam maupun ke luar, yaitu: 1) Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial dan indentitas nasional masing-masing; 2) Setiap negara berhak untuk mengarahkan eksistensi nasionalnya agar terbebas dari campur tangan pihak luar, subversi, ataupun pemaksaan kehendak; 3) Tidak saling campur tangan dalam urusan internal masing-masing; 4) Penyelesaian perbedaan dan sengketa secara damai; 5) Menahan diri untuk tidak mengancam atau menggunakan kekerasan; dan 6) Menjalani kerjasama yang efektif (ASEAN Sekretariat, 1977).

Dalam tulisan ini konsep “rezim persahabatan ASEAN” mencakup keseluruhan isi TAC beserta semangat yang mengiringinya serta kebiasaan-kebiasaan yang telah berlangsung sejak ditandatanganinya dokumen tersebut hingga saat ini. Termasuk pula di dalamnya “ASEAN way”, yaitu upaya pencarian dan penerapan prinsip-prinsip dan norma-norma khas ASEAN dalam hubungan antarnegara, dalam membangun kerjasama dan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip dan norma-norma tersebut sudah lama ada dan dipraktekkan di hampir semua negara anggota ASEAN. Intisari

prinsip dan norma tersebut adalah musyawarah-mufakat dalam pengambilan keputusan, serta tidak mencampuri urusan domestik negara lain (Anthony, 2003; Agnese, 2003). Dalam tulisan ini penyertaan “ASEAN way” ke dalam konsep “rezim persahabatan ASEAN” itu didasarkan pada definisi rezim yang mengandung pengertian lebih dari sekedar perjanjian dan persetujuan internasional.

### **ASEAN Connectivity**

Gagasan tentang *ASEAN Connectivity* merujuk pada keterhubungan secara fisik, kelembagaan, dan antarpenduduk yang merupakan bagian dari dukungan untuk peletakan fondasi dan penyediaan sarana-sarana untuk membangun pilar-pilar ekonomi, politik-keamanan, dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan visi terbentuknya komunitas ASEAN yang terintegrasi. Semakin eratnya keterhubungan intra regional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempersempit kesenjangan pembangunan yaitu dengan terjadinya proses saling berbagi keuntungan dari pertumbuhan tersebut dengan kelompok dan komunitas yang lebih miskin, meningkatkan daya saing ASEAN, dan mempertautkan negara-negara anggota ASEAN secara intra-regional maupun dengan negara-negara di luar kawasan. Semakin mendalam dan meluasnya keterhubungan di dalam kawasan, akan memperkuat posisi ASEAN dalam lingkup asia maupun global. Oleh karena itu visi *ASEAN Connectivity* adalah perwujudan komunitas ASEAN yang dinamis dan terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang damai dan makmur, dan menjadikan ASEAN sebagai pemain kunci dalam lingkup asia maupun dunia (ASEAN Sekretariat, 2011).

Sebagaimana disebutkan di atas, *ASEAN Connectivity* mencakup keterhubungan dalam tiga bidang, yaitu

fisik, kelembagaan, dan penduduk. Keterhubungan fisik mencakup baik infrastruktur transportasi, teknologi informasi komunikasi, dan pengelolaan energi maupun kerangka peraturan dan perangkat lunak pendukungnya. Keterhubungan fisik memainkan peran penting dalam proses menuju terjadinya kawasan Asia Tenggara yang terintegrasi secara ekonomi dan secara sosial-budaya. Keterhubungan kelembagaan merujuk pada kesaling-terkaitan antara berbagai protokol persetujuan internasional dan persetujuan regional untuk memfasilitasi transaksi internasional dalam barang dan jasa maupun dalam pergerakan lintas-batas yang dilakukan secara alamiah oleh para warga. Di dalamnya termasuk meletakkan strategi, persetujuan-persetujuan, serta mekanisme hukum dan kelembagaan untuk secara efektif mewujudkan konektivitas ASEAN, menyediakan fasilitasi perdagangan barang dan jasa, serta menyediakan kebijakan investasi dan kerangka hukum yang baik yang dapat menarik minat investor. Sedang keterhubungan penduduk mencakup upaya menumbuhkan inisiatif untuk mengembangkan investasi dalam bidang pendidikan, pengembangan sumberdaya manusia, mendorong kewirausahaan, meningkatkan pertukaran kebudayaan ASEAN, dan mengembangkan pariwisata beserta industri lain yang terkait (ASEAN Secretariat, 2011).

Salah satu proyek prioritas yang akan dibangun dalam kerangka keterhubungan fisik adalah interkoneksi Kalimantan Barat (Indonesia) dan Sarawak (Malaysia), yaitu proyek pembangunan jaringan listrik sepanjang 120 km. Dalam proyek yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2013 itu pihak Indonesia (PLN) akan membangun jaringan sepanjang 82 km di sisi Kalimantan Barat, sedang Malaysia akan membangun jaringan sepanjang 38 km di sisi Sarawak. Jaringan listrik tersebut

nantinya dapat menghemat konsumsi bahan bakar minyak yang selama ini digunakan pembangkit listrik di Kalimantan Barat. Dengan proyek itu baik Indonesia maupun Malaysia akan sama-sama bisa mengoptimalkan pemanfaatan cadangan listrik karena adanya perbedaan waktu puncak penggunaan (*peak hours*), yaitu Sarawak pada siang hari, sedang Kalimantan Barat pada malam hari. Di samping itu, perbedaan *peak hours* itu terjadi karena antara kedua wilayah terdapat perbedaan waktu, yaitu selisih satu jam (ASEAN Secretariat, 2011).

Secara umum gagasan *ASEAN Connectivity* mengandung anggapan-anggapan sebagai berikut. Pertama, di bawah ASEAN penduduk Asia Tenggara pada dasarnya satu, khususnya satu entitas ekonomi. Perbedaan kewarganegaraan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi di mana pun di kawasan Asia Tenggara. Kedua, karena kawasan Asia Tenggara merupakan satu entitas ekonomi maka wacana nasionalisme sampai tingkat tertentu akan dianggap kontraproduktif. Ketiga, sebagai satu entitas ekonomi, Asia Tenggara akan menjadi satu basis produksi dalam rantai distribusi barang dalam pasar global.

Dengan anggapan-anggapan seperti itu maka perlahan tetapi pasti komunitas ASEAN akan menjadi komunitas ekonomi yang dengan sendirinya material *oriented*. Kesatupaduan Asia Tenggara memang terwujud, interaksi sinergis juga terjadi, tetapi spirit yang melandasinya telah bergeser dari semula kesetiakawanan menjadi "rekan bisnis". Spirit kesetiakawanan mengandaikan semua pihak (negara) ada dalam posisi otonom dan hubungan dibangun berdasar kehendak yang tulus untuk meraih cita-cita bersama tanpa menghilangkan otonomi masing-masing. Sedang spirit "rekan bisnis" mengandaikan bawa masing-masing pihak

memiliki modal atau alat produksi untuk dikerjasamakan dalam meraih kemakmuran, dengan sistem pembagian berdasar besar-kecil modal dan tinggi-rendahnya keterampilan dalam berbisnis. Semakin besar modal dan tinggi keterampilan yang dimiliki maka semakin besar bagian yang diperoleh, dan sebaliknya semakin kecil modal dan semakin rendah keterampilan yang dimiliki maka semakin kecil porsi kemakmuran yang dapat diperoleh.

Uraian di atas berkesesuaian dengan intisari gagasan neoliberalisme sebagaimana dipaparkan Priyono (2004). Menurut Priyono, intisari gagasan neoliberalisme adalah bahwa cara-cara orang bertransaksi dalam kegiatan ekonomi merupakan satu-satunya corak yang melandasi semua tindakan dan relasi antarmanusia, baik dalam persahabatan, keluarga, hukum, tata negara, maupun hubungan internasional. Jadi, menurut Priyono, tindakan dan hubungan antarpribadi, maupun tindakan dan hubungan legal, sosial, dan politis hanyalah ungkapan dari model hubungan menurut kalkulasi untung-rugi individual yang terjadi dalam transaksi ekonomi (Priyono, 2004: 54).

Dengan keadaan seperti itu maka mudah dimengerti jika pergeseran corak hubungan intra ASEAN bukan hanya dalam spirit saja, melainkan juga dalam bidang yang digarap. Jika semula, pada awal pendirian hingga beberapa waktu sesudah berakhirnya perang dingin, arus utama dinamika ASEAN adalah pada bidang politik dan keamanan, kini arus utama dinamika ASEAN ada pada bidang ekonomi.

### **Tata Kelola Lintas Perbatasan Berbasis Connectivity**

Perbincangan tentang tata kelola lintas perbatasan bisa dibingkai setidaknya dalam tiga cara pandang. Yang pertama melihat medan perbatasannya itu sendiri, sedang dua lainnya melihat pola interaksi penduduk

yang ada di wilayah perbatasan. Masing-masing diuraikan di bawah ini.

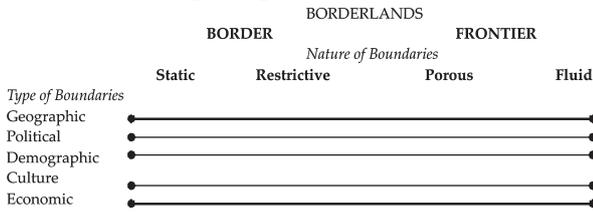
Cara pandang pertama yang melihat perbatasan dari medannya itu sendiri antara lain dikembangkan oleh Parker (2006). Ia bermaksud membangun kerangka analisis yang bisa digunakan oleh berbagai disiplin ilmu yang sedang membahas perbatasan. Hal itu ia anggap penting karena, menurutnya, selama ini setiap disiplin ilmu memberi makna yang berbeda-beda tentang perbatasan, yang dengan demikian juga menggunakan kerangka berpikir yang berlainan (Parker, 2006).

Untuk membangun kerangka pikirnya itu pertama-tama Parker membuat perbedaan antara *border* dengan *frontier*. Ia mendefinisikan *border* sebagai "*linear deviding lines, fixed in a particular space, meant to mark the deviation between political and/or administrative units*". Sedang *frontier* ia definisikan sebagai "*a zone of interpenetration between two previously distinct peoples. Such a zone could separate various types of political or cultural units and such zone may also be made up of empty areas where no such units exist or where they do not come onto direct physical direct contact*" (Parker, 2006: 78-79).

Selanjutnya Parker meletakkan kedua konsep tersebut dalam satu garis kontinum dengan *border* diletakkan di bagian kiri, sedang *frontier* di bagian kanan. Pada garis kontinum itu ia letakkan empat kategori mulai dari "*static*" di ujung kiri, dilanjutkan "*restrictive*" di sebelah kanannya, kemudian "*porous*", dan "*fluid*" di ujung kanan. Ia buat lima buah garis kontinum dimana masing-masing garis menunjukkan aspek-aspek yang terdapat dalam masalah perbatasan, yaitu geografi, politik, demografi, budaya, dan ekonomi. Parker sengaja hanya menempatkan lima garis, dengan pertimbangan bahwa aspek-aspek lain dapat dimasukkan ke dalam lima kategori yang dipilih tersebut (Parker, 2006).

Gambaran kerangka yang dikembangkan Parker tersebut adalah sebagai berikut.

**Figure 1**  
**Rentang Pengelolaan Perbatasan**



Sumber: Bradley J Parker, "Toward an Understanding of Borderland Processes", *American Antiquity*, vol.70, No.1 (Jan. 2006), hlm. 82

Jika gagasan tentang tata kelola lintas perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* diletakkan dalam kerangka konseptual Parker maka, pada tingkat yang paling ideal, pada masing-masing garis kontinum dari kelima tipe atau aspek tersebut posisinya ada di ujung kanan. Dengan kata lain, dari segi geografi, politik, demografi, budaya, dan ekonomi semuanya harus bersifat cair. Dengan sifat yang cair itu maka dimungkinkan terjadi interaksi dan kerjasama antarnegara. Sifat cair dalam aspek geografi bisa bermakna kesediaan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam secara bersama-sama. Sifat cair dalam aspek politik bisa bermakna kesediaan menjalin dialog dan mengutamakan negosiasi ketimbang kekerasan militer. Dalam aspek demografi, sifat cair bermakna adanya keleluasaan interaksi antarpenduduk untuk berbagai keperluan. Sifat cair dalam aspek kebudayaan bisa bermakna kesediaan saling menghargai perbedaan agama, etnis, bahasa, adat-istiadat, dan seterusnya. Sedang dalam aspek ekonomi, sifat cair bermakna terbukanya kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi antar kedua belah pihak, dan bahkan mungkin bermakna terbukanya peluang untuk melakukan usaha bersama.

Sudah tentu level ideal semacam itu, apalagi mencakup keseluruhan dari kelima

aspek, sulit diwujudkan. Sekalipun demikian, kerangka konseptual Parker di atas sekurang-kurangnya dapat menunjukkan arah untuk mewujudkan tata kelola lintas perbatasan yang berbasis *connectivity and common prosperity*, yang dalam konseptualisasi ini direpresentasikan dalam konsep "frontier".

Dalam dinamika hubungan Indonesia-Malaysia dari waktu ke waktu, kalaulah tidak semua aspek diletakkan di ujung kanan dari garis kontinum (dalam posisi cair), maka dapat dibuat komposisi optimal yang paling mungkin dicapai. Misalnya tiga aspek (demografi, budaya, ekonomi) bisa di posisi ujung kanan, satu aspek (geografi) ada di tengah, dan satu aspek lagi (politik) ada di nomor dua dari kiri. Atau formula lain yang lebih sesuai kondisi saat itu. Kira-kira seperti cara kerja seorang *Disc Jockey* (DJ) mengatur suara musik sesuai irama dan suasana yang dikehendaki.

Cara pandang kedua, yang lebih melihat pola hubungan penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, antara lain dikemukakan oleh Darmaputra (2009). Menurut Darmaputra, kondisi perbatasan antarnegara dapat dibedakan dalam empat kategori, yaitu: 1) *Alienated borderland*, yaitu wilayah perbatasan yang tidak terdapat aktifitas lintas batas. Hal itu terjadi antara lain karena adanya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik. 2) *Coexistent borderland*, yaitu wilayah perbatasan yang sebenarnya memiliki potensi konflik tetapi bisa dikelola sehingga tidak meledak. 3) *Interdependent borderland*, yaitu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya terjalin hubungan yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan. 4) *Integrated borderland*, yaitu wilayah perbatasan yang

kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan (Darmaputra, 2009).

Dalam kategorisasi di atas, pola hubungan penduduk di perbatasan darat Indonesia-Malaysia saat ini ada pada kategori ketiga, yaitu *interdependent borderland*. Hal itu dapat dilihat dari berbagai berita media massa yang menunjukkan bahwa warga dari kedua negara yang berbatasan, yaitu warga Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur pada sisi Indonesia, dalam keseharian melakukan kegiatan ekonomi dan sosial secara bersama-sama dengan warga dari Sarawak dan Sabah pada sisi Malaysia. Kenyataan itu bahkan juga telah diakui oleh lembaga pemerintah (Bappenas, 2010; Tempo.co, 21 Maret 2012; Republika.co.id, 28 Mei 2012).

Gagasan tentang tata kelola lintas perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity*, dikombinasikan dengan program *ASEAN Connectivity* akan mendorong kondisi perbatasan darat Indonesia-Malaysia ke arah kategori empat, yaitu *integrated borderland*. Ketika *ASEAN Connectivity* telah benar-benar dilaksanakan, khususnya untuk keterhubungan fisik yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2013, maka kesatuan kegiatan ekonomi akan terwujud. Ketika kesatuan kegiatan ekonomi kedua negara terwujud maka gagasan tata kelola lintas perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* pun terjadi.

Cara pandang ketiga, yang juga hirau pada pola hubungan penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, antara lain dikemukakan oleh Husnadi (2006). Husnadi menunjukkan empat kategori hubungan antarpenduduk di kawasan perbatasan, yaitu: a) hubungan antarpenduduk kedua negara tidak seimbang, yaitu penduduk dari negara yang secara ekonomi relatif tertinggal cenderung berorientasi ke negara tetangganya yang lebih maju; b) hubungan

antarpenduduk kedua negara tidak seimbang, tetapi polanya berkebalikan, yaitu penduduk dari negara yang secara ekonomi lebih maju justru cenderung berorientasi ke negara tetangganya yang lebih terbelakang; c) terjadi kontrol perbatasan yang sangat ketat sehingga hubungan antarpenduduk kedua negara hampir-hampir tidak terjadi; dan d) hubungan ekonomi antarpenduduk kedua negara berkembang ke arah integrasi (Husnadi, 2006).

Lebih lanjut Husnadi menyatakan bahwa kondisi hubungan antarpenduduk Indonesia-Malaysia di kawasan perbatasan yang dia teliti mengikuti kecenderungan kategori a), yaitu hubungan antarpenduduk kedua negara tidak seimbang. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya warga Kabupaten Sambas (Indonesia) yang menjual hasil pertanian, berbelanja kebutuhan sehari-hari, dan bahkan mencari pekerjaan di wilayah Sarawak (Malaysia) (Husnadi, 2006).

Sebuah studi yang dilakukan Bank Indonesia (tanpa tahun) menunjukkan bahwa barang-barang dari Sarawak yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat mencapai 30 jenis komoditi yang seluruhnya merupakan barang kebutuhan pokok sehari-hari. Barang-barang tersebut antara lain: tabung gas, ikan, minyak goreng, tepung, telur, sayuran, rokok, susu, makanan kaleng, minuman kaleng, aneka snack, dan lain-lain. Sementara itu barang-barang dari Kalimantan Barat yang keluar menuju Sarawak tercatat hanya lima jenis komoditi yang semuanya bukan merupakan kebutuhan pokok, yaitu lada hitam, biji coklat, karet & kulit, tengkawang, serta kusen pintu & jendela. (Bank Indonesia, tanpa tahun; *Media Indonesia*, 2011; *Republika*, 2012; RRI, 2012) Dengan kata lain, penduduk Kalimantan Barat banyak melakukan transaksi dengan penduduk Sarawak baik untuk memenuhi kebutuhan

pokok maupun untuk menjual produk pertanian dan kerajinan mereka.

Selain dalam kegiatan perdagangan, interaksi warga perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur juga dilakukan dalam hal pengobatan. Banyak warga di Pulau Sebatik yang memilih berobat ke rumah sakit di Tawau, Sabah karena beberapa pertimbangan seperti ketersediaan dokter, ketersediaan obat, dan kualitas layanan (*Republika*, 2012).

Bidang lain yang juga menjadi ajang interaksi penduduk kedua negara adalah energi, khususnya pasokan listrik. Pada tahun 2009 PLN wilayah Kalimantan Barat telah melakukan pembelian suplai listrik dari Malaysia untuk disalurkan ke dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas dan Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu (*Viva News*, 2012).

Untuk kebutuhan bahan bakar minyak, warga Kalimantan Barat juga membeli dari Sarawak, Malaysia. Selain harganya lebih murah dan kualitas barangnya lebih bagus, barang tersebut bisa diperoleh dalam jarak yang lebih dekat (*Tempo*, 2012). Hal serupa terjadi dalam pemenuhan kebutuhan telekomunikasi, khususnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Karena jaringan dari Indonesia belum menjangkau daerah tersebut maka penduduk setempat memenuhi kebutuhan telekomunikasi dengan memanfaatkan layanan operator telepon dari Malaysia (*Tribun*, 20112).

Dengan gambaran kenyataan seperti diuraikan di atas maka gagasan tentang tata kelola lintas perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity*, dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengarahkan pola interaksi ke kategori d), yaitu berupaya melakukan integrasi ekonomi kedua negara. Hal demikian sejalan dengan program *ASEAN Connectivity* yang salah satu

tujuannya adalah mengembangkan kerjasama dan integrasi regional.

Berdasar ketiga perspektif di atas dapat dikatakan bahwa gagasan tentang tata kelola lintas perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* memiliki landasan teoritis yang kuat. Gagasan tersebut juga memiliki landasan legal yang mapan. Sementara itu, secara empiris gagasan tersebut juga mendapat dukungan yang signifikan, yaitu kenyataan bahwa penduduk kedua negara yang tinggal di kawasan perbatasan sebagian berasal dari suku yang sama, dan mereka secara riil telah melakukan interaksi intensif dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## Pembahasan

Paparan tentang *ASEAN Connectivity* dan tentang tata kelola lintas perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* sebagaimana disajikan di atas menunjukkan bahwa keduanya memiliki alur logika yang sama setidaknya dalam dua hal. Pertama, upaya pencapaian dan pengembangan ekonomi diletakkan pada posisi sentral, sedang urusan kedaulatan negara, termasuk di dalamnya nasionalisme, tidak ditonjolkan. Kedua, untuk mewujudkan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan diperlukan kesediaan kedua belah pihak (kedua negara bertetangga) untuk membuat semua aspek yang berhubungan dengan kawasan perbatasan bersifat cair alias tidak kaku.

Dari segi substansi, alur logika di atas sejalan dengan tujuan pembentukan ASEAN, khususnya pada tujuan pertama dan kelima. Pada tujuan pertama dinyatakan "*To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations*". Sedang pada tujuan kelima dinyatakan, "*To collaborate more effectively*

*for the greater utilization of their agriculture and industries, the expansion of their trade, including the study of the problems of international commodity trade, the improvement of their transportation and communications facilities and the raising of the living standards of their peoples". (ASEAN Secretariat, 1967)*

Sekalipun demikian perlu dicermati bahwa alur logika *ASEAN Connectivity* maupun alur logika tata kelola lintas perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* itu membawa implikasi dalam beberapa hal. Pertama, masalah eksistensi negara dan kedaulatan menjadi persoalan yang dikesampingkan. Kedua, karena urusan kedaulatan cenderung dikesampingkan maka urusan keamanan negara juga dikesampingkan, diganti dengan urusan keamanan warga sebagai urusan yang diutamakan. Ketiga, sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka seluruh perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan harus dirancang agar menjadi sejalan. Rancang-ulang tersebut dengan sendirinya memerlukan usaha yang sungguh-sungguh, khususnya untuk menyamakan persepsi semua pihak terkait. Hal ini tidak lepas dari perjalanan sejarah, baik dalam tata pemerintahan internal masing-masing negara maupun dalam hubungan kedua negara.

Perjalanan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa penduduk negeri ini memiliki semangat juang dan jiwa nasionalisme yang tinggi yang dibuktikan dalam perang untuk memperoleh kemerdekaan. Selanjutnya dalam ketatanegaraan Indonesia pernah terdapat masa yang panjang di mana tentara mempunyai kewenangan yang demikian besar pada semua aspek kehidupan dan menempatkan urusan pertahanan-keamanan sebagai penjurus bagi semua kebijakan. Pada masa yang lain dalam perjalanan sejarah itu juga pernah terjadi

konfrontasi Indonesia-Malaysia yang hingga kini masih terus terdengar gaungnya. Kenyataan sejarah yang telah berurat-akar itu membuat pihak-pihak yang bersangkutan tidak bisa begitu mengubah cara pandang. Oleh karena itu untuk mencapai persamaan persepsi diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan terus-menerus.

Dari sisi Malaysia, sejarah menunjukkan bahwa kawasan Sabah pernah dan masih terus menjadi daerah yang diperebutkan dengan Filipina. Klaim Filipina atas wilayah itu yang didasarkan pada sejarah kerajaan ratusan tahun silam, hingga kini masih sering mengemuka. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Malaysia senantiasa bersikap waspada terhadap semua hal yang berkaitan dengan di wilayah tersebut.

Sulitnya menyamakan persepsi semua pihak internal Indonesia dalam rangka rancang-ulang pengelolaan kawasan perbatasan, sebagaimana dikemukakan di atas, itu selaras dengan gambaran kondisi umum bidang wilayah dan tata ruang sebagaimana dimuat dalam Buku II Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 yang menyatakan:

Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan nasional. Sesuai dengan arahan pembangunan jangka panjang nasional, upaya pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam (*inward looking*), yaitu memandang kawasan perbatasan semata-mata sebagai wilayah pertahanan dan keamanan, menjadi berorientasi ke luar (*outward looking*) yaitu dengan juga memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas perdagangan dan ekonomi dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang digunakan selain dengan pendekatan keamanan juga dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan lingkungan (Bappenas, 2012).

Titik singgung implikasi alur logika *ASEAN Connectivity* beserta alur logika tata kelola lintas perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* pada satu sisi, dengan alur logika rezim persahabatan ASEAN pada sisi lain, terletak pada spirit yang melandasinya. Sebagaimana dikemukakan pada bagian depan, spirit yang melandasi hubungan antarnegara anggota ASEAN, yang sering disebut “ASEAN way” adalah spirit kekeluargaan. Dengan semangat kekeluargaan itu semua hal diputuskan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Semua pihak didengar aspirasi dan sikapnya, serta dihargai dalam kedudukan yang setara.

Sementara itu, pembangunan kawasan perbatasan baik dalam konteks *ASEAN Connectivity* maupun dalam konteks tata kelola perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity*, terutama dilandasi motif ekonomi. Motif-motif ekonomi umumnya tidak bisa dibahas dalam semangat kekeluargaan. Program dengan motif ekonomi cenderung menuntut ketegasan, kepastian, dan bersifat kaku. Terlebih karena program pengembangan ekonomi itu senantiasa melibatkan dunia usaha yang, sesuai jatidirinya, selalu berpikir dengan kalkulasi untung-rugi.

Motif-motif ekonomi semacam itu merupakan karakter utama dari corak hubungan internasional yang dilandasi pemikiran liberal beserta perkembangannya yang kini disebut neoliberal. Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, intisari gagasan neoliberalisme adalah menempatkan cara-cara orang bertransaksi dalam kegiatan ekonomi sebagai satu-satunya landasan dalam semua tindakan dan relasi antarmanusia, baik dalam persahabatan, keluarga, hukum, tata negara, maupun hubungan internasional. Tindakan dan hubungan antarpribadi maupun tindakan dan hubungan legal, sosial, dan politis dianggap hanya merupakan hubungan

yang didasari kalkulasi untung-rugi individual (Priyono, 2004: 54). Oleh karena itu, pengembangan tata kelola perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* yang merupakan turunan dari, atau sekurang-kurangnya ada pada alur berpikir yang sama dengan, program *ASEAN Connectivity* patut diyakini akan berlawanan dengan spirit awal ASEAN.

Harus diakui bahwa upaya membentuk ASEAN pada tahun 1967 itu sendiri sudah merupakan bentuk empirik dari perubahan cara pandang terhadap hubungan internasional. Jika sebelumnya menggunakan cara pandang realis, maka lahirnya kehendak membentuk ASEAN itu memberi bukti empiris bahwa para pelakunya ketika itu sedang beralih untuk mempraktekkan cara pandang internasionalisme liberal. Oleh karena itu, sepiantas akan terlihat wajar jika kini ASEAN dikembangkan ke tingkat yang lebih lanjut dari neoliberalisme, yaitu neoliberalisme. Maka pengembangan AFTA beserta turunan dan cabang-cabangnya, termasuk tata kelola perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity*, juga terlihat sebagai kewajaran juga.

Sekalipun demikian, melalui telaah yang lebih mendalam akan terlihat adanya pergeseran lebih jauh pada cara pandang yang menjadi landasan berpikir dalam pengelolaan ASEAN. Pergeseran itu berlangsung sejalan dengan perkembangan pemikiran neoliberalisme. Pada mulanya, menurut Priyono (2004), neoliberalisme atau ordo-liberal tidak menempatkan relasi ekonomi sebagai satu-satunya bentuk interaksi antarmanusia, melainkan juga memasukkan dan mengakui peran pemerintah. Gagasan pokok neoliberalisme pada awalnya adalah membuat perimbangan antara kebebasan dan keadilan sosial, antara manusia individual dan manusia komunitas. Ketika cara pandang tersebut berkembang menjadi neoliberalisme, pokok gagasannya berubah

menjadi menempatkan individu sebagai subyek utama dalam setiap interaksi dan sama sekali tidak mengakui peran negara (Priyono, 2004: 51-59).

Seperti pergeseran ordo-liberal menjadi neoliberal, seperti itu pulalah pergeseran cara pandang yang melandasi pengelolaan ASEAN. Pada perkembangan awal, *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) yang disepakati tahun 1976 dapat dipandang sebagai bentuk implementasi cara pandang ordo-liberal, yaitu di dalamnya masih mengakui kedaulatan masing-masing negara anggota. Demikian pula konsep *ASEAN Community* yang dicanangkan tahun 2003 juga masih dalam kerangka ordo-liberal karena masih mengakui adanya komunitas, bukan menempatkan individu sebagai satu-satunya subyek. Dalam perkembangan ke tahap selanjutnya, program *ASEAN Connectivity* beserta konsep tata kelola perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* jelas mengedepankan kegiatan usaha dengan kekuatan modal sebagai penentu utamanya, yang tidak lain merupakan cara pandang neoliberalisme.

Menurut Burchill (1996), ide awal neoliberalisme adalah adanya negara-negara berdaulat yang menjalin perdagangan satu sama lain. Sekarang hal itu tidak terjadi lagi. Para pengusaha kini dapat menjalankan bisnis di mana pun di muka bumi ini. Para pengusaha itu pula yang kini menjadi penguasa oleh karena negara telah kehilangan kedaulatan khususnya dalam bidang ekonomi. Kini kedaulatan negara telah hilang, digantikan oleh kedaulatan modal (Burchill, 1996).

## Penutup

Simpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah bahwa gagasan tentang pengelolaan lintas perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* memiliki keselarasan ide dengan program *ASEAN Connectivity*. Selanjutnya, kedua

konsep itu secara bersama-sama memiliki keselarasan ide dengan tujuan pembentukan ASEAN. Dalam kaitan dengan rezim persahabatan ASEAN, kedua konsep tersebut memiliki perbedaan dalam corak hubungan, yaitu rezim persahabatan ASEAN bercorak kesetiakawanan, sedang kedua konsep konektifitas itu bercorak hubungan bisnis. Kesetiakawanan mengandaikan adanya kesediaan berkorban dan mengalah demi kebersamaan, sedang hubungan bisnis mengandaikan adanya peluang untuk memaksimalkan perolehan masing-masing pihak.

Pengelolaan perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* pada akhirnya menempatkan masalah kedaulatan negara bukan sebagai pertimbangan utama, apalagi satu-satunya, dalam hubungan kedua negara. Oleh karena itu penerapan kedaulatan negara harus diselaraskan dengan dinamika hubungan antarpenduduk di wilayah perbatasan kedua negara, dan bukan sebaliknya, dinamika hubungan antarpenduduk yang harus menyesuaikan diri dengan urusan penegakan kadaulatan.

Pergeseran cara pandang dalam pengelolaan perbatasan itu, dalam ranah paradigma bukan hanya berlawanan dengan spirit yang terkandung dalam rezim persahabatan ASEAN. Lebih dari itu, pergeseran itu mencerminkan pergeseran paradigma ASEAN secara menyeluruh. Sebelum dibentuknya ASEAN, para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara mempraktekkan cara pandang realis. Setelah itu mereka beralih ke cara pandang liberalisme internasional, yaitu dengan membentuk ASEAN dengan seluruh program dan prosedurnya. Pergeseran lebih lanjut terjadi ketika ASEAN mencanangkan AFTA beserta turunan dan cabang-cabangnya, termasuk konsep tata kelola perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity*, yaitu dengan mengamalkan paradigma neoliberalisme.

## Daftar Pustaka

- Agnese, Ellena dell'. (2003). One Southeast Asia: Emerging Iconographies in the Making of a Region. *Ekistics*. Sept-Dec.
- Antara Sumut. (2010). Laskah Merah Putih Membakar Bendera Malaysia. 17 Agustus 2010. *Antara Sumut*. (Online). (<http://www.antarasumut.com/laskar-merah-putih-membakar-bendera-malaysia>, diakses 20 Desember 2012).
- Anthony, Mely Cabalero. (2002). Partnership for Peace in Asia: ASEAN, the ARF, and the UN. *Contemporary Southeast Asia*, vol. 24, No.3.
- ASEAN Sekretariat. (1967). *The ASEAN Declaration*.
- ASEAN Secretariat. (1976). *Treaty of Amity and Cooperation*.
- ASEAN Secretariat. (2011). *Master Plan on ASEAN Connectivity*.
- Bank Indonesia. tanpa tahun. BOKS, Perbatasan Kalimantan Barat Masih Perlu Perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah. *Bank Indonesia*. (Online). (<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EDE1E7EC-30F3-4DAE-99CF-FFE587EE8554/24706/BOKS.pdf>, diakses 21 Desember 2012).
- Bappenas. (2012). *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012*. Buku II.
- Bappenas. (2010). Perbedaan di Perbatasan Itu Nyata Ada. 19 Juli 2010. *Kompas.com*. (Online). ([http://batas.bappenas.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=113&Itemid=9](http://batas.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=9), diakses 21 Desember 2012).
- Burchill, Scott, Andrew Linklater. (1996). *Theories of International Relations*. New York: ST Martin's Press Inc.
- Darmaputra, Rizal. (2009). *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: IDSPS Press.
- Dimitrov, Mitko, George Petrakos, Stoyan Totev and Maria Tsiapa. (2003). Cross-Border Cooperation in Southeastern Europe: The Enterprises' Point of View. *Eastern European Economics*: Vol. 41. No. 6.
- French, Lindsey. (2002). "From Politics to Economics at the Thai-Cambodian Border: Plus ça Change...." *International Journal of Politics, Culture, and Society*: Vol.15. No.3.
- Hasenclever, Andreas, Peter Mayer, Volker Rittberger. (1997). *Theories of International Regimes*: Cambridge, Cambridge University Press.
- Husnadi. (2006). *Menuju Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Daratan Antar Negara (Studi Kasus: Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)*, Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Magister Teknik Pengembangan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
- Media Indonesia. (2012). Warga Perbatasan Indonesia-Malaysia Saling Berjual-Beli. 15 Oktober 2012. *Metro Tv News*. (Online). (<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/10/15/268381/127/101/Warga-Perbatasan-Indonesia-Malaysia-saling-Berjual-Beli>, diakses 21 Desember 2012).
- Parker, Bradley J. (2006). Toward an Understanding of Borderland Processes. *American Antiquity*, vol.70, No.1.
- Priyono, Herry B. (2004). "Dalam Pusaran Neoliberalisme", dalam I Wibowo dan Francis Wahono, (ed.) *Neoliberalisme*. Yogyakarta, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.

- Kompas. (2010). Detik-detik Penangkapan 3 Petugas DKP. 15 Agustus 2010. *Kompas.com*. (Online). (<http://internasional.kompas.com/read/2010/08/15/20255241/Detik-detik.Penangkapan.3.Petugas.DKP-5>, diakses 23 Desember 2012).
- Kompas. (2009). Malaysia Kembali Pancing Amarah Relawan Indonesia. 6 Juni 2009. *Kompas.com*. (Online). (<http://nasional.kompas.com/read/2009/06/06/03034055/Malaysia.Kembali.Pancing.Amarah.Relawan.Indonesia>, diakses 19 Desember 2012).
- Kompas. (2009). TNI AL soal Ambalat: Kami Siap Tembak, Jika Diperintah. 6 Juni 2009. *Kompas.com*. (Online). (<http://nasional.kompas.com/read/2009/06/06/14503358/TNI.AL.soal.Ambalat.Kami.Siap.Tembak.Jika.Diperintah>, diakses 19 Desember 2012).
- Kompas. (2010). Menko Polhukam Sudah Laporkan Presiden. 15 Agustus 2010. *Kompas.com*. (Online). (<http://internasional.kompas.com/read/2010/08/15/16305878/Menkopolhukam.Sudah.Laporkan.Presiden>, diakses 23 Desember 2012).
- Republika. (2012). Potret Perbatasan: Tinggal di Indonesia, Menggantungkan Hidup Dengan Malaysia. 28 Mei 2012. *Republika Online*. (Online). (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/nusantara-nasional/12/05/28/m4pugy-potret-perbatasan-tinggal-di-indonesia-menggantungkan-hidup-dengan-malaysia>, diakses 18 Desember 2012).
- Republika. (2012). Tinggal di Indonesia, Menggantungkan Hidup di Malaysia. 28 Mei 2012. *Republika Online*. (Online). (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/nusantara-nasional/12/05/28/m4pugy-potret-perbatasan-tinggal-di-indonesia-menggantungkan> hidup-dengan-malaysia, 18 Desember 2012).
- Republika. (2011). Warga Camar Bulan Temukan Bongkahan Semen yang Hancur... Diduga Patok Wilayah Perbatasan RI-Malaysia. 13 Oktober 2011. *Republika Online*. (Online). (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/10/13/lt02ll-warga-camar-bulan-temukan-bongkahan-semen-yang-hancur-diduga-patok-wilayah-perbatasan-rimalaysia>, diakses 18 Desember 2012).
- Republika. (2012). Warga Perbatasan Sebatik Lebih Memilih Berobat ke Malaysia. 17 Oktober 2012. *Republika Online*. (Online). (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/12/10/17/mbzy79-warga-perbatasan-sebatik-lebih-memilih-berobat-di-malaysia>, diakses 18 Desember 2012).
- RRI. (2012). Kami Cinta Indonesia, Tetapi Kami Cinta Produk Malaysia. 30 Mei 2012. (Online). (<http://rri.co.id/index.php/detailberita/detail/19546#.ULJ44mciXWA>, diakses 23 Desember 2012).
- Suara Pembaruan. (2011). Warga Camar Bulan Temukan Patok Tapal Batas yang Diduga Dihancurkan Malaysia. 13 Oktober 2011. *Suara Pembaruan*. (Online). (<http://www.suarapembaruan.com/home/warga-camar-bulan-temukan-patok-tapal-batas-yang-diduga-dihancurkan-malaysia/12397>, diakses 23 Desember 2012).
- Tempo. (2012). Warga Perbatasan Pilih Beli BBM ke Malaysia. 21 Maret 2012. *Tempo*. (Online). (<http://www.tempo.co/read/news/2012/03/21/058391769/Warga-Perbatasan-Pilih-Beli-BBM-ke-Malaysia>, diakses 23 Desember 2012).

- Tempo. (2009). Konflik Ambalat: Warga Sebatik Diberi Latihan Menembak. 1 Juni 2009. *Tempo*. (Online). (<http://www.tempo.co/read/news/2009/06/01/078179277/Konflik-Ambalat-Warga-Sebatik-Diberi-Latihan-Menembak>, diakses 23 Desember 2012).
- Tempo. (2009). Kedutaan Besar Malaysia Kembali Didemo. 11 Juni 2009. *Tempo*. (Online). (<http://www.tempo.co/read/news/2009/06/11/078181347/Kedutaan-Besar-Malaysia-Kembali-Didemo>, diakses 23 Desember 2012).
- Tribun News. (2012). Warga Sebatik Tengah Masih Tergantung Operator Malaysia. 12 Oktober 2012. *Tribun News*. (Online). (<http://www.tribunnews.com/2012/10/12/warga-sebatik-tengah-masih-tergantung-operator-malaysia>, diakses 23 Desember 2012).
- Viva News. (2012). Listrik Malaysia Terangi Wilayah Indonesia. 12 Maret 2012. *Viva News*. (Online). (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/295296-warga-perbatasan--kami-belum-merdeka>, diakses 18 Desember 2012).